

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dengan memberikan bahan pertimbangan untuk dapat merancang strategi kebijakan pembangunan sektor konstruksi yang dapat memperkuat struktur perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, rumusan hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi wilayah sektor konstruksi di Provinsi Jambi selama periode penelitian berada pada wilayah non basis tidak prospektif maju tapi tertekan, ini menunjukkan kontribusi sektor konstruksi tinggi, namun tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Pada wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo dan Kota Jambi berada di sektor basis prospektif cepat maju dan tumbuh, yang menjelaskan kontribusi sektor konstruksi dan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya, sementara Kabupaten Merangin, Tebo dan Kota Sungai Penuh pada wilayah berkembang yang menjelaskan kontribusi sektor konstruksi tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi rendah.

Wilayah Kabupaten Sarolangun berada di sektor basis tidak prospektif wilayah berkembang artinya kontribusi sektor konstruksi tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat non basis prospektif maju tapi tertekan yang menyatakan kontribusi tinggi, namun pertumbuhan ekonomi rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya.

Sektor konstruksi di Kabupaten Batanghari merupakan kawasan non basis tidak prospektif, hal ini menunjukkan kontribusi sektor konstruksi tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, kemudian Kabupaten Muaro Jambi sektor non basis tidak prospektif wilayah relatif tertinggal, memiliki

kontribusi sektor konstruksi dan pendapatan perkapitanya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya.

2. Faktor yang signifikan mempengaruhi sektor konstruksi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yaitu tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi dan indek pembangunan manusia, sementara indek kemahalan konstruksi berpengaruh negatif dan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap sektor konstruksi. Untuk secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap sektor konstruksi.
3. Pemanfaatan kekuatan dan peluang internal dengan memperkuat kebijakan ketersediaan badan usaha jasa konstruksi atau penyedia jasa, investasi (PMDN dan PMA), kondisi srategis potensi wilayah dan pendapatan perkapita daerah merupakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Adanya kelemahan yang harus diperbaiki dalam mendukung kebijakan tersebut seperti transformasi infrastruktur dasar yang belum memadai, penyerapan tenaga kerja konstruksi, letak geografis dan kawasan lindung dan proporsi alokasi anggaran harus segera diantisipasi bagi peningkatan sektor konstruksi pada Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi ancaman, memanfaatkan kekuatan dan peluang melalui strategi diversifikasi eksternal akan permintaan barang dan jasa, minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi, perlu dukungan penuh dari pemerintah dalam memajukan sektor konstruksi dan prioritas rencana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi di Provinsi Jambi.

Disisi lain, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi adanya ancaman bagi peningkatan ekonomi seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau daerah pada pembangunan ekonomi, regulasi daerah dan implementasi bagi dunia usaha di sektor konstruksi, kompetensi tenaga kerja dan penyedia jasa konstruksi dan dampak sosial kemasyarakatan terhadap iklim bagi pelaku usaha.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan alokasi anggaran pengeluaran pemerintah yang bersumber APBD, APBN pada sektor konstruksi dan investasi swasta serta pelaksanaannya sesuai rencana strategis perencanaan pembangunan daerah, diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga sektor konstruksi di masing-masing daerah berada pada posisi sektor basis yang prospektif, cepata maju dan cepat tumbuh.
2. Sektor konstruksi mampu memberikan kontribusi terhadap sektor ekonomi lainnya, oleh karena itu alokasi anggaran pada sektor konstruksi dan investasi swasta pada daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, harus ditingkatkan dan menjadikan komitmen bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta ruang investasi bagi pihak swasta. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan disesuaikan dengan potensi wilayah suatu daerah di dalam merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi, agar kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.
3. Ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi dan kondisi geografis wilayah serta rendahnya belanja modal daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, diperoleh temuan hasil permasalahan pada penelitian ini, oleh karenanya diperlukan langkah strategis yaitu pemerintah dalam hal pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada jasa konstruksi, baik itu kompetensi tenaga kerja maupun badan usaha jasa konstruksi; menurunkan angka indek kemahalan konstruksi, antara lain dengan cara meningkatkan alokasi anggaran pada PDRB sektor konstruksi; mendorong investasi (PMDN dan PMA).

Guna percepatan pembangunan ekonomi dan akan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja konstruksi serta kesempatan bagi badan usaha jasa konstruksi dan disarankan me-review kembali rencana tata ruang wilayah

(RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota serta membuat regulasi bagi daerah dan implementasi bagi dunia usaha khususnya pada sektor konstruksi.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Beberapa keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, keterbatasan-keterbatasan pada peneliti ini antara lain:

- a. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada tenaga kerja di sektor konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) di Daerah Kabupaten Kota Provinsi Jambi, hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan data tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) sesuai amanat Undang-undang Jasa Konstruksi, sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat 1 dan 2.
- b. Jumlah badan usaha jasa konstruksi/penyedia jasa yang berdomisili di luar wilayah Provinsi Jambi yang melakukan kegiatan pada sektor konstruksi.
- c. Waktu penyebaran kuesioner melalui *link google form*, ternyata kurang tepat karena karena tidak melakukan tatap muka atau wawancara langsung (*site survey*) kepada responden, sehingga jumlah kuesioner yang terisi tidak sesuai dengan target yang diharapkan dan terkadang dalam menjawab item butir instrumen yang diberikan oleh responden memiliki perspektif yang berbeda dan beragam dengan keadaan sesungguhnya.

6.4 Implikasi Hasil Penelitian.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka hasil penelitian ini dapat digunakan baik untuk pengembangan teori secara lebih lanjut, penerapan dalam praktek yang ada, dan penguatan kebijakan. Implikasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menguatkan penelitian yaitu tingginya IKK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB sektor

konstruksi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi sehingga berdampak pada rendahnya indek pembangunan manusia (IPM), penurunan belanja modal, sesuai penelitian Muda dkk, (2014).

Hasil analisis SWOT juga ditemukan kelemahan dan ancaman pada kondisi letak geografis daerah yang menggambarkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah akibat tingginya IKK. Pada sisi lain, ditemukan kekuatan dan ancaman pada ketersediaan badan usaha jasa konstruksi atau penyedia jasa di daerah terhadap badan usaha yang berdomisili di luar daerah Provinsi Jambi.

2. Implikasi Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi sebagai masukan dalam program perencanaan pembangunan melalui potensi wilayah pada sektor unggulan, meningkatkan PDRB sektor konstruksi, pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan daerah. Perencanaan pembangunan berdasarkan hasil temuan penelitian ini, menjadikan perumusan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan di implementasikan pada rencana kerja pemerintah (RKP) serta realisasi pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahunan.

3. Implikasi Kebijakan.

Adapun implikasi kebijakan yang dapat disimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya, dapat di simpulkan langkah-langkah kebijakan bagi pemerintah daerah, antara lain :

1. Sektor konstruksi merupakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi, maka tugas pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi berupaya menjadikannya pada sektor basis atau sektor unggulan prospektif cepat maju dan tumbuh guna meningkatkan perekonomian daerah melalui koordinasi pada Kementerian terkait untuk mendapat alokasi dana APBN yang besar guna percepatan pembangunan ekonomi disamping penguatan alokasi perimbangan DAU dan DAK serta peran swasta sehingga berdampak pada lintas sektoral. Pada sisi lain peran pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada jasa konstruksi, baik itu

kompetensi tenaga kerja maupun badan usaha jasa konstruksi akan memberikan manfaat pada kualitas sektor konstruksi,

2. Menurunkan angka indeks kemahalan konstruksi (IKK), antara lain dengan cara meningkatkan alokasi anggaran pada PDRB sektor konstruksi yang berdampak pada saran dan prasarana infrastruktur dasar ke arah membaik dan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat guna peningkatan kesejahteraan pendapatan ekonomi masyarakat,
3. Mendorong investasi (PMDN dan PMA) guna percepatan pembangunan ekonomi dan akan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja konstruksi serta kesempatan bagi pelaku usaha (BUJK),
5. Disarankan me-review kembali RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota serta membuat regulasi bagi daerah dan implementasi bagi dunia usaha khususnya pada sektor konstruksi.
6. Peran civil society ikut melakukan monitoring, mengevaluasi dan memberikan saran, masukan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal rencana penggunaan APBD Kabupaten Kota di Provinsi Jambi guna memastikan adanya peningkatan alokasi belanja anggaran pemerintah, termasuk peningkatan investasi swasta pada pembangunan di sektor konstruksi dan bantuan dana CSR serta lainnya.